

RINGKASAN

**M. THATS MAHARAHMAN JJ
220510211**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK
PIDANA PEMBANGUNAN PAGAR
LAUT BERSERTIFIKAT SHGB DAN
SHM YANG DIGUNAKAN SECARA
ILEGAL**

**(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.,
Dan Tasyukur, S.H., M.H.)**

Pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang sepanjang 30,16 km menimbulkan masalah serius karena membatasi akses publik ke laut, merugikan mata pencaharian nelayan, serta merusak lingkungan dan ekosistem pesisir. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya penerbitan SHGB dan SHM ilegal di wilayah laut yang mengindikasikan adanya maladministrasi dalam proses perizinan.

Oleh karena itu, penelitian ini membahas apasaja jenis-jenis dan unsur-unsur tindak pidana dalam pembangunan pagar laut, serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Pembangunan pagar laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan unsur serta mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Pembangunan pagar laut di Tangerang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk menganalisis tindak pidana Pembangunan pagar laut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pagar laut memenuhi unsur tindak pidana karena merupakan perbuatan melawan hukum yang meliputi pemalsuan dokumen, pelanggaran tata ruang, tindak pidana lingkungan hidup, pemanfaatan wilayah pesisir tanpa izin, dan berpotensi mengandung tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut melanggar norma hukum pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, wilayah pesisir, dan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pelaku, baik individu maupun korporasi, dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP, UU Penataan Ruang, UU Lingkungan Hidup, UU Wilayah Pesisir, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembangunan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang merupakan tindak pidana karena melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana tambahan, disertai sanksi administratif, pencabutan izin, serta kewajiban pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan regulasi terkait pemanfaatan wilayah pesisir, peningkatan pengawasan oleh pemerintah, perlindungan hak masyarakat pesisir, serta penegakan hukum yang tegas terhadap individu maupun korporasi guna memberikan efek jera terhadap para pelaku, menjamin rasa keadilan terhadap masyarakat, dan kelestarian lingkungan serta.

Kata Kunci: Tindak pidana, Pembangunan pagar laut, sanksi pidana

SUMMARY

**M. THATS MAHARAHMAN JJ
220510211**

**LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL
ACTION OF CONSTRUCTION OF A
CERTIFIED SHGB AND SHM SEA
FENCE THAT IS USED ILLEGALLY**

**(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.,
Dan Tasyukur, S.H., M.H.)**

The construction of a 30.16-kilometer sea fence in Tangerang Regency has created serious problems by restricting public access to the sea, harming the livelihoods of fishermen, and damaging the coastal environment and ecosystem. This problem is further complicated by the issuance of illegal SHGB and SHM in the sea area, indicating maladministration in the licensing process.

Therefore, this study examines the types and elements of criminal offenses in the construction of sea fences, as well as how criminal sanctions are applied to those involved in sea fence construction. This study aims to identify the types and elements, as well as the application of criminal sanctions to those involved in the construction of sea fences in Tangerang.

This study uses a normative juridical method and a statutory approach to analyze the criminal offense of sea fence construction.

The results indicate that the construction of the sea fence meets the elements of a criminal offense because it constitutes an unlawful act that includes document falsification, violation of spatial planning, environmental crimes, unauthorized use of coastal areas, and potentially involves elements of corruption. These acts violate legal norms concerning land, spatial planning, the environment, coastal areas, and good governance. Therefore, perpetrators, both individuals and corporations, can be subject to criminal sanctions under the Criminal Code, the Spatial Planning Law, the Environmental Law, the Coastal Areas Law, and the Corruption Eradication Law.

The construction of a seawall along the coast of Tangerang Regency constitutes a criminal offense as it violates various applicable legal provisions. Such actions may incur criminal penalties—including imprisonment and additional sanctions—alongside administrative penalties, permit revocation, and the obligation to undertake environmental restoration. Therefore, it is essential to harmonize regulations regarding coastal zone utilization, enhance government oversight, protect the rights of coastal communities, and strictly enforce the law against both individuals and corporations; these measures are necessary to deter offenders, ensure justice for the community, and safeguard environmental sustainability.

Keyword: Criminal acts, construction of sea fences, criminal sanctions